

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SYAWAL
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 1000783

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **360.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 394 m2/200 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 4.000.000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **223.000.000**

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, DATSUN DATSUN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **2.961.645****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **585.961.645**



III. HUTANG

Rp. 229.581.803

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 356.379.842

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.